

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Krealif Berbasis Agama dan Berbudaya	1.Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas. 2.Mewujudkan Perekonomian Maju, Masyarakat Adil dan Merata yang Inklusif berbasis Potensi Unggulan dan Kearifan Lokal. 3.Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Ramah Lingkungan dan Mitigasi Bencana yang Berkelanjutan 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Inovatif serta Pelayanan Publik 5.Membangun Ketahanan Budaya dan Pariwisata yang berlandaskan ABS-SBK	Memastikan setiap anak di Pariaman, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Mewujudkan lingkungan dan perilaku hidup sehat untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Berkarakter dengan mendorong prestasi olahraga sebagai wahana pembentukan karakter, pengembangan bakat, serta menjamin kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan. Penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan. Penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	IKG IPG	-

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Masih Rendahnya Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan Dalam Mengikuti Kegiatan Musrenbang Tingkat Kota Pariaman. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase data peserta musrenbang yang terlaksana pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025. - Persentase Data Tahun 2023: Laki-laki :79 % Perempuan dan Kelompok Rentan : 21 % - Persentase Data Tahun 2024: Laki-laki :75 % Perempuan dan Kelompok Rentan : 25 % - Persentase Data Tahun 2025: Laki-laki :72 % Perempuan dan Kelompok Rentan : 28 %	Faktor Penyebab di Ranah Masyarakat : - Budaya patriarki yang masih kuat sehingga masyarakat masih memandang laki-laki sebagai pihak yang lebih berhak mewakili keluarga/ komunitas dalam forum pengambilan keputusan. - Perempuan cenderung dianggap sebagai pelaksana urusan domestik sehingga keterlibatannya dalam forum publik kurang didorong. - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan - Sebagian masyarakat belum memahami bahwa perempuan memiliki kebutuhan dan perspektif yang berbeda yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. - Musrenbang masih dipandang sebagai urusan aparat atau tokoh masyarakat tertentu. - Domnasi laki-laki dalam kelembagaan masyarakat, Kepengurusan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, lembaga adat, dan organisasi masyarakat masih didominasi laki-laki. Akibatnya, calon peserta dan usulan yang dibawa ke Musrenbang lebih banyak berasal dari perspektif laki-laki. - Terbatasnya dukungan lingkungan sosial Perempuan yang aktif dalam kegiatan publik terkadang belum memperoleh dukungan penuh dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Prioritas perempuan masih	Rencana Aksi - Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh serta Integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui edukasi publik, diseminasi praktik baik dan penyebarluasan Informasi melalui media sosial dan berbagai forum masyarakat. - Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang melalui pemenuhan keterwakilan penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya, penyediaan forum yang aksesibel dan inklusif, serta pelaksanaan konsultasi dan penjangkaran aspirasi kelompok rentan sebelum pelaksanaan Musrenbang. - Peningkatan diseminasi informasi Musrenbang melalui berbagai media	- DP3AKB - Diskominfo - Inspektorat - Pemerintah Desa/Kelurahan

b. Partisipasi Perempuan dan kelompok rentan cenderung minim berpartisipasi di musrenbang dikarenakan; - Keterbatasan akses informasi, sehingga tidak mengetahui jadwal, mekanisme, maupun pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan. c. Kontrol - Norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan dan kelompok rentan sebagai pihak yang kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik - Adanya dominasi laki-laki dalam forum perencanaan, sehingga perempuan memiliki ruang yang lebih kecil untuk memengaruhi keputusan dan menentukan prioritas pembangunan d. Manfaat - Usulan yang disampaikan perempuan sering kali tidak menjadi prioritas, sehingga mereka merasa keikutsertaannya tidak memberikan hasil yang signifikan. - Program pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik perempuan, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, penguatan ekonomi perempuan, atau fasilitas pendukung pengasuhan.	masyarakat, belum terdapat mekanisme yang kuat untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna dalam Musrenbang. c. Sosialisasi dan penyebaran informasi yang belum menjangkau seluruh kelompok perempuan seperti informasi mengenai jadwal, tata cara, dan kesempatan berpartisipasi dalam Musrenbang sehingga informasi belum tersampaikan secara merata kepada perempuan dan kelompok rentan. d. Kapasitas aparatur dalam perencanaan responsif gender masih terbatas, sehingga aparatur penyelenggara Musrenbang belum seluruhnya memahami cara mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan. e. Mekanisme Musrenbang belum sepenuhnya inklusif, yakni waktu, tempat, metode pelaksanaan, dan tata cara diskusi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi perempuan dan kelompok rentan. f. Rendahnya tindak lanjut terhadap usulan perempuan, dimana usulan yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan sering kali belum menjadi prioritas program atau kegiatan sehingga menimbulkan persepsi bahwa partisipasi perempuan tidak memberikan dampak yang nyata. g. Monitoring dan evaluasi partisipasi perempuan belum optimal dimana belum terdapat pemantauan yang konsisten terhadap tingkat keterlibatan perempuan maupun pengaruh usulan perempuan terhadap hasil perencanaan pembangunan.		
--	---	--	--

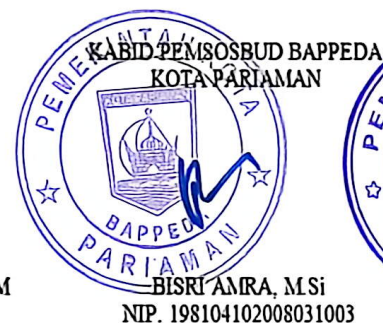
2. Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan keselaraan gender, dengan mengisi label berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
1. Menyempurnakan tata kelola dan mekanisme Musrenbang agar lebih responsif gender dan ramah bagi kelompok rentan melalui pengaturan waktu, metode, dan tata cara pelaksanaan yang inklusif. 2. Meningkatkan pengawalan dan integrasi usulan perempuan dan kelompok rentan ke dalam dokumen perencanaan daerah serta proses penetapan prioritas pembangunan. 3. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbang melalui pemanfaatan data terpilah gender dan penyusunan laporan evaluasi berkala	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPEDA

Penanggung Jawab Kegiatan,



TIM PENGGERAK/DRIVER PPRG TAHUN 2026
 PARIAMAN, 01 JULI 2026



LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN TA 2027

Perangkat Daerah	BAPPEDA
Program	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kode Sub kegiatan	5.01.02.2.01.0005
Kinerja	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Satuan	2 Berita Acara

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;

2. Gambaran Umum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum partisipatif yang menjadi wadah strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan usulan pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah. Melalui Musrenbang, pemerintah daerah berupaya mewujudkan proses perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, serta mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, kualitas Musrenbang tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari tingkat keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dalam proses penyampaian aspirasi serta pengambilan keputusan. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut menjadi penting karena mereka memiliki kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dalam mengakses layanan publik maupun menikmati hasil pembangunan.

Meskipun demikian, partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam Musrenbang masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan sosial, budaya, ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kepercayaan diri dalam forum publik sering kali menyebabkan perempuan dan kelompok rentan belum dapat berpartisipasi secara optimal. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kebutuhan spesifik mereka kurang teridentifikasi dan kurang terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Akibatnya, program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan berisiko belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat dan belum menghasilkan manfaat pembangunan yang setara.

Sejalan dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pembangunan inklusif, penyelenggaraan Musrenbang perlu memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan kelompok rentan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan

keterwakilan perempuan dalam forum perencanaan, penyediaan ruang dialog yang inklusif, penguatan kapasitas peserta perempuan dan kelompok rentan, serta mekanisme pengawalan usulan agar aspirasi yang disampaikan dapat terakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Perkembangan tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbang selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Data peserta Musrenbang Tahun 2023–2025 menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dari tahun ke tahun.

No	Tahun Pelaksanaan	Peserta Laki-laki	Peserta Perempuan	Persentase (%)
1	2023	175	75	30 %
2	2024	167	83	33 %
3	2025	160	90	36 %

Berdasarkan data tersebut, jumlah peserta perempuan meningkat dari 75 orang pada tahun 2023 menjadi 90 orang pada tahun 2025, atau bertambah sebanyak 15 orang dalam kurun waktu tiga tahun. Secara proporsional, tingkat keterwakilan perempuan meningkat dari 30 persen menjadi 36 persen, atau naik sebesar 6 poin persentase. Pada saat yang sama, jumlah peserta laki-laki menurun dari 175 orang menjadi 160 orang, yang menunjukkan semakin seimbangnya komposisi peserta Musrenbang antara laki-laki dan perempuan.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Jika pada tahun 2023 komposisi peserta masih didominasi laki-laki dengan perbandingan 2,3 laki-laki untuk setiap 1 perempuan, maka pada tahun 2025 perbandingan tersebut membaik menjadi sekitar 1,8 laki-laki untuk setiap 1 perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan mulai memberikan hasil yang positif.

Namun demikian, peningkatan kuantitas partisipasi perempuan belum secara otomatis mencerminkan peningkatan kualitas partisipasi. Tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan usulan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang nyata dari hasil pembangunan yang direncanakan. Oleh karena itu, penguatan Musrenbang yang responsif gender dan inklusif tetap menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat miskin), peserta Musrenbang, serta aparatur perencana pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang yang responsif gender dan inklusif, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut:

(1) Persiapan

Kegiatan persiapan diawali dengan koordinasi dan konsultasi internal Bappeda serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan Musrenbang yang responsif gender dan inklusif. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan guna menyusun strategi pelaksanaan kegiatan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan peserta Musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya pada setiap tingkatan Musrenbang.
- b. Menyusun dan menyebarkan materi sosialisasi, instrumen penjangkauan aspirasi, bahan diskusi, serta pedoman pelaksanaan Musrenbang yang responsif gender dan inklusif.

- c. Menentukan narasumber, fasilitator, moderator, dan tim pendamping yang memiliki pemahaman mengenai perencanaan pembangunan responsif gender.
- d. Menyiapkan lokasi, waktu, metode pelaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung yang ramah bagi perempuan dan kelompok rentan, termasuk mempertimbangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kebutuhan pendukung lainnya.
- e. Melaksanakan sosialisasi jadwal, mekanisme, dan tata cara Musrenbang melalui berbagai media komunikasi agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

(2) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, inklusif, dan responsif gender.

- **Pelaksanaan Musrenbang**

Melaksanakan forum Musrenbang dengan memastikan keterlibatan aktif perempuan dan kelompok rentan dalam proses penyampaian aspirasi, pembahasan usulan, dan penetapan prioritas pembangunan. Selain itu dilakukan fasilitasi penjangkauan kebutuhan dan permasalahan spesifik perempuan serta kelompok rentan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.

- **Pendampingan dan Pengawasan Usulan**

Melakukan pendampingan selama proses Musrenbang serta pengawasan terhadap usulan perempuan dan kelompok rentan agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- **Monitoring dan Evaluasi**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat partisipasi perempuan dan kelompok rentan, kualitas keterlibatan dalam forum Musrenbang, serta tingkat akomodasi usulan yang disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan, observasi pelaksanaan kegiatan, serta penyebaran instrumen evaluasi kepada peserta.

- **Pelaporan**

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat capaian partisipasi perempuan dan kelompok rentan, hasil pembahasan usulan, tindak lanjut rekomendasi, serta evaluasi pelaksanaan Musrenbang sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Musrenbang pada periode berikutnya.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan pada selama Januari s/d Mei 2027

E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA BAPPEDA Kota Parlamen Tahun 2027 dengan anggaran sebesar 160.395.600,00

Penanggung Jawab Kegiatan,

BISRI-AMRA, M.Si

